

**ANALISIS KETIDAKSEIMBANGAN FISKAL
VERTIKAL DAN HORIZONTAL DI JAWA TIMUR
PERIODE 2007-2012 (STUDI KASUS 38
KABUPATEN/KOTA)**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Daldiri Zainin Lazuardi
0910210037**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2013**

**Analisis Ketidakseimbangan Fiskal Vertikal dan Horizontal di Jawa Timur Periode 2007-2012
(Studi Kasus 38 Kabupaten/Kota)**

Daldiri Zainin Lazuardi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang

Email : daldirizainin@gmail.com

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Berbagai faktor yang dimiliki oleh masing-masing daerah mampu menciptakan keberhasilan dari pembangunan tersebut, diantaranya adalah sistem ekonomi, ketersediaan sumber daya, teknologi, efisiensi, budaya, kualitas sumber daya manusia dan kualitas birokrasi. Kebijakan fiskal merupakan pengelolaan anggaran pemerintah (budget) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Kecenderungan yang terjadi di banyak negara berkembang dalam mencapai keberhasilan pembangunan adalah dilaksanakannya proses penguatan pemerintah daerah atau desentralisasi di sektor fiskal, yang di Indonesia dikenal dengan otonomi daerah. Tingkat kemampuan fiskal dan juga kebutuhan fiskal di tiap daerah menciptakan sebuah kondisi ketidakseimbangan fiskal. Dengan menggunakan data yang terdiri dari 38 Kabupaten dan Kota yang ada di Jawa Timur dalam kurun waktu 6 tahun yaitu 2007-2012. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kondisi ketidakseimbangan fiskal baik vertikal maupun horizontal di Kabupaten/Kota Jawa Timur pada tahun 2007-2012.

Analisis data pada penelitian ini menggunakan Metode Koefisien Ketidakseimbangan Fiskal Vertikal dan Indeks Theil untuk melihat ketidakseimbangan fiskal horizontal. Data yang digunakan terdiri dari data APBD antara lain pendapatan asli daerah, porsi transfer, pinjaman dan total pengeluaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode penelitian dari tahun 2007 hingga tahun 2012 terdapat ketidakseimbangan fiskal baik dari sisi vertikal maupun horizontal. Kecenderungan tingkat ketidakseimbangan fiskal dari tahun ke tahun semakin meningkat di tiap daerah di Jawa Timur. Masih banyaknya daerah dari sisi pemerataan PAD Perkapita, PDRB Perkapita dan Pengeluaran Perkapita bernilai negatif.

Kata kunci: Desentralisasi Fiskal, Ketidakseimbangan Fiskal Vertikal, Ketidakseimbangan Fiskal Horizontal

A. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Berbagai faktor yang dimiliki oleh masing-masing daerah mampu menciptakan keberhasilan dari pembangunan tersebut, diantaranya adalah sistem ekonomi, ketersediaan sumber daya, teknologi, efisiensi, budaya, kualitas sumber daya manusia dan kualitas birokrasi. Dalam konsep ekonomi secara umum dikenal dua kebijakan ekonomi yang utama, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter merupakan pengendalian sektor moneter, sedangkan kebijakan fiskal merupakan pengelolaan anggaran pemerintah (*budget*) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Kecenderungan yang terjadi di banyak negara berkembang dalam mencapai keberhasilan pembangunan adalah dilaksanakannya proses penguatan pemerintah daerah atau desentralisasi di sektor fiskal, yang di Indonesia dikenal dengan otonomi daerah. Dari sisi pemerintah, ada 2 hal utama yang menjadi bahasan sehubungan dengan adanya otonomi daerah yakni kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) yang keduanya dapat dikaitkan dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menjadi isu persaingan ekonomi antar daerah. Selisih dari kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal ini disebut *fiscal gap* yang akan menjadi patokan dalam menentukan besarnya transfer dari pusat.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Provinsi Jawa Timur menunjukkan kecenderungan meningkat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur pada tahun 2011 mencapai Rp.8,90 trilyun, atau meningkat sebesar 18,98 persen dibanding tahun

sebelumnya. Dana Perimbangan juga mengalami peningkatan sebesar 2,83 persen yaitu pada tahun 2010 sebesar Rp. 2,37 trilyun menjadi Rp. 2,44 trilyun pada tahun 2011. Kontribusi terbesar dari Dana Perimbangan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 55,21 persen atau sebesar Rp. 1,35 trilyun. Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 11,09 persen dibanding tahun 2010. DAU pada tahun 2010 sebesar Rp. 1,21 trilyun meningkat menjadi Rp. 1,35 trilyun pada tahun 2011. Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2011 terjadi penurunan sebesar -3,42 persen atau Rp. 56,98 milyar di tahun 2011. Hal tersebut juga terjadi pada Dana Bagi Hasil (DBH) terjadi penurunan di tahun 2011 sebesar (6,92) persen atau sebesar Rp.1,08 triliun tahun 2010 dan di tahun 2011 sebesar Rp. 1,00 triliun.

Tabel 1: **Dana Alokasi Jawa Timur 2010-2011**

Anggaran	2010	2011
PAD (Triliun Rp.)	7,48	8,90
Dana Perimbangan (Triliun Rp.)	2,37	2,44
DAU (Triliun Rp)	1,21	1,35
DAK (Milyar Rp)	56,98	55,03
DBH (Triliun Rp)	1,08	1,00
Dana Penyesuaian (Milyar Rp)	28,54	37,48

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur

Berbagai penelitian telah dilakukan di banyak level baik nasional dan regional. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Bird dan Tarasov (2002) yang membahas tentang konsep ketidakseimbangan fiskal vertikal (kesenjangan fiskal) dan ketidakseimbangan fiskal horizontal (pemerataan) dengan menggunakan statistik dari 8 negara industri maju antara lain Australia, Austria, Belgia, Kanada, Jerman, Spanyol, Swiss dan Amerika Serikat. Dengan menguraikan jenis transfer fiskal antar pemerintah yang digunakan untuk mengatasi ketimpangan fiskal di delapan Negara tersebut. Hasil yang disimpulkan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa transfer fiskal antar pemerintah adalah instrumen, bukan penentu kebijakan publik. Pentingnya pemerintah dalam mendesain jenis transfer secara tepat dari waktu ke waktu untuk kebijakan keseimbangan fiskal. Efek transfer yang bertujuan sebagai keseimbangan regional, pemerataan pendapatan per kapita regional, dan tingkat pelayanan publik di daerah kapasitas ekonomi yang berbeda dapat bervariasi dari satu negara ke negara dan waktu ke waktu. Pentingnya sebuah pemerintah memiliki dana perimbangan. Dari penelitian ini, Kanada, Amerika Serikat, dan Swiss merupakan negara-negara yang memiliki otonomi paling fiskal. Setidaknya yang berhubungan dengan efek transfer pada upaya fiskal, meskipun ada fitur khusus dari sistem transfer mungkin memberikan kekhawatiran. Uraian permasalahan yang telah dijelaskan di atas tentu saja bermuara akhir pada satu tujuan, yakni keseimbangan keuangan di tiap daerah. Dengan penjelasan yang dijabarkan di atas, maka pokok masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana kondisi ketidakseimbangan fiskal baik vertikal maupun horizontal di Kabupaten/Kota Jawa Timur pada tahun 2007-2012

B. KAJIAN PUSTAKA

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan. Definisi tersebut menunjukkan wewenang Pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan anggaran daerahnya yang disebut dengan kebijakan Desentralisasi Fiskal. kebijakan transfer dana dari Pusat kepada Daerah untuk mencapai tujuan berbeda-beda, antara lain:

1. Mengatasi persoalan ketimpangan fiskal antara Pusat dengan Daerah, sebab sebagian besar sumber-sumber penerimaan utama yang berasal dari pajak, masih dikelola oleh Pemerintah Pusat.
2. Mengatasi persoalan ketidakseimbangan fiskal antar daerah, sebab potensi penerimaan dan kemampuan daerah untuk menghimpun pendapatan sangat bervariasi, demikian juga dengan kebutuhan pembiayaan program dan fasilitasnya.
3. Menjaga tercapainya SPM (Standar Pelayanan Minimum) di setiap daerah, sebab daerah dengan sumber daya yang kecil memerlukan bantuan agar dapat mencapai SPM itu.
4. Mengatasi persoalan yang timbul dari menyebarnya efek pelayanan publik (*interjurisdictional spill-over effect*), sebab adanya fasilitas pelayanan publik pada suatu daerah yang dapat dinikmati juga oleh daerah lain.
5. Meningkatkan stabilitas dan keberlanjutan pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi.

Ketidakseimbangan Fiskal Vertikal (*Vertical Fiscal Imbalance*)

Jika "ketidakseimbangan" adalah masalah, maka "keseimbangan" tampaknya akan menjadi solusi. Dengan demikian tidak mengherankan bahwa konsep ketidakseimbangan fiskal yang telah disebut (Boadway dan Hobson, 1993) dalam Bird dan Tarasov (2002) sering dibahas seolah-olah dalam sebuah pemerintahan idealnya PAD dari setiap tingkat pemerintahan harus cukup untuk membiayai pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya tanpa bantuan transfer fiskal. Keseimbangan fiskal antar pemerintah harus dipahami bahwa setiap tingkat pemerintahan harus memiliki sumber pendapatan independen yang cukup untuk membiayai belanja yang ditugaskan untuk tingkat daerahnya, tidak lebih dan tidak kurang. Dengan kata lain, pemberian tugas untuk membiayai pengeluaran, pendapatan harus seimbang juga, ia berpendapat bahwa pemberian tugas sehingga tidak ada "ketidakseimbangan" antara pendapatan dan pengeluaran pada setiap tingkatan pemerintahan. Menurut Eyraud (2012) secara khusus, terdapat dua pendapat utama yang berhubungan dengan ketidakseimbangan fiskal vertikal untuk posisi fiskal pemerintah pusat:

1. Sumber keuangan pemerintah yang dinyatakan sebagai "hak milik bersama" menciptakan kebijakan fiskal yang dapat menghasilkan defisit fiskal yang berlebihan. Hal ini terjadi karena kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan khusus memiliki akses terhadap sumber daya pemerintah tidak sepenuhnya menginternalisasikan biaya pengeluaran program yang menguntungkan konstituen mereka. Misalnya, pengeluaran kementerian cenderung mengabaikan eksternalitas yang timbul dari keputusan pengeluaran mereka selama proses negosiasi anggaran Hallerberg dan Von Hagen (1999) dalam Eyraud (2012). Salah satu implikasi penting dari model nya adalah bahwa, ketika pendapatan pemerintah adalah milik bersama yang otoritas desentralisasi fiskal mengekstrak sumber daya, defisit fiskal muncul tanpa ada jangka waktu .
2. Kendala anggaran juga menunjukkan bahwa ketidakseimbangan fiskal vertikal mempengaruhi kinerja fiskal. Pemerintah daerah dengan ketidakseimbangan fiskal vertikal tinggi tidak memiliki pajak yang cukup dan tidak memiliki otoritas pinjaman untuk mengatasi

guncangan Von Hagen dan Eichengreen (1996) dalam Eyraud (2012). Pemerintah daerah mungkin mengalami krisis fiskal (tidak mampu membayar upah atau ketentuan pinjaman) ketika menghadapi guncangan. Karena pemerintah daerah mengklaim bahwa guncangan tersebut bukan tanggung jawabnya. Tekanan dari masyarakat akan diarahkan pada pemerintah pusat, yang tidak mempunyai pilihan selain membantu pemerintah daerah mengatasi guncangan tersebut. Mengantisipasi hal ini, pemerintah daerah memiliki insentif untuk terlibat dalam resiko kebijakan fiskal. Rodden et al. (2003) dalam Eyraud (2012) menunjukkan bahwa pemerintah pusat mentransfer insentif untuk daerah yang mempunyai tanggung jawab fiskal lemah, karena lebih bermanfaat untuk diposisikan sebagai dana cadangan.

Ketidakseimbangan Fiskal Horizontal (*Horizontal Fiscal Imbalance*)

Ketidakseimbangan fiskal horizontal muncul ketika tiap pemerintah daerah memiliki kemampuan yang berbeda untuk mengumpulkan dana dari dasar pengenaan pajak mereka untuk menyediakan standar layanan publik. Hal ini menciptakan perbedaan dalam manfaat fiskal yang merupakan kombinasi dari tingkat perpajakan dan pelayanan publik. Ketidakseimbangan fiskal horizontal yang pada akhirnya menghasilkan kebutuhan untuk hibah pemerataan. Tujuan umum transfer fiskal antar pemerintah adalah untuk pemerataan kapasitas fiskal atau resolusi ketidakseimbangan fiskal horizontal. Dengan demikian, sistem transfer dapat meningkatkan efisiensi di sektor publik dan dapat tingkat lapangan untuk kompetisi antar pemerintah.

Ketidakseimbangan fiskal horizontal mempunyai tugas untuk membangun fondasi yang diperlukan untuk desentralisasi yang secara umum menyamakan tingkat transfer ke beberapa pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas fiskalnya sehingga penempatan dana bantuan untuk setiap daerah dapat diatasi. Ketidakseimbangan fiskal horizontal juga mempunyai tugas untuk menyediakan sumber daya yang cukup untuk memungkinkan semua pemerintah daerah bahkan daerah yang terkecil dan termiskin untuk menyediakan paket dasar pelayanan publik. Pemenuhan pemerataan untuk mengatasi ketidakseimbangan fiskal akan tercapai jika standar kapasitas fiskal dapat meningkatkan pendapatan daerah tersebut. Di kebanyakan negara, keterbatasan anggaran menyebabkan penyediaan paket dasar pelayanan publik yang lebih rendah, seperti rata-rata kapasitas meningkatkan pendapatan pemerintah daerah. Dalam kasus tersebut, daerah dengan kapasitas di bawah rata-rata jelas dirugikan (Bird :2002).

Dalam teori serta praktik, sebuah sistem transfer untuk pemerataan tiap daerah dianggap diperlukan karena berhubungan dengan kesetaraan dan efisiensi. Mengikuti Rangarajan dan Srivastava (2008), terdapat dua pertimbangan dalam implikasi efisiensi yang diantaranya adalah :

1. inefisiensi alokasi
yaitu migrasi dari inefisiensi yang disebabkan oleh surplus fiskal dinetralkan oleh transfer pemerataan; dan
2. redistribusi
yaitu transfer dari dana perimbangan daerah kaya kepada daerah miskin memberikan keseimbangan fiskal horizontal dalam upaya pemenuhan standar pelayanan publik

C. METODE PENELITIAN

Populasi Penelitian dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data runtun waktu dari periode Tahun 2007 sampai Tahun 2012, untuk semua Kabupaten/Kota Jawa Timur. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa publikasi dari berbagai instansi yang sejauh ini dianggap sebagai sumber penyaji data yang valid untuk data-data yang digunakan untuk menghitung dalam definisi, untuk variabel yang sama dengan tahun berbeda, diupayakan dengan menggunakan sumber data yang sama.

Namun, apabila semua tidak dapat terpenuhi, maka diperoleh dari sumber yang berbeda yang secara desplisit menggunakan cara pengukuran yang sama. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, antara lain bersumber dari instansi pemerintah seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Timur, Kantor Biro Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Selain itu juga menggunakan studi kepustakaan, sebagai referensi yang digunakan untuk melengkapi data dan menganalisis permasalahan

Metode Analisis

Untuk mencapai tujuan penelitian ini analisis yang digunakan adalah bersifat kuantitatif deskriptif dengan menggunakan rumus statistik sederhana. Analisis kuantitatif untuk menghitung ketidakseimbangan fiskal kabupaten/kota se-Jawa Timur dengan menggunakan Koefisien Korelasi Ketimpangan Fiskal Vertikal. Jumlah tahun yang dipilih dalam perhitungan disparitas fiskal ialah 6 tahun (2007-2012). Mengikuti penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bird dan Tarasov (2002), untuk setiap daerah dihitung dengan tiga langkah progresif untuk lebih mempersempit ketidakseimbangan fiskal dan dimodelkan sebagai berikut :

CVI 1 : Transfer antarpemerintah dalam pengeluaran pemerintah daerah

$$CVI^I_j = \frac{(REV_{SH})_{SNG}}{(EXP+B)^{NT}_{SNG}}$$

CVI 2: Transfer Antarpemerintah dan bagi hasil pajak/bukan pajakantar pemerintah dalam belanja pemerintah subnasional

$$CVI^II_j = \frac{(REV_{SH})_{SNG} - (IGNB)_{SNG}}{(EXP+B)^{NT}_{SNG}}$$

CVI 3: Porsi belanja pemerintah daerah yang tidak tercakup oleh pendapatan pemerintah daerah itu sendiri:

$$CVI^III_j = \frac{1 - (REV + (TR_{GP} + TR_{SP}))_{SNG} - (REV_{SH})_{SNG} - (IGNB)_{SNG}}{(EXP+B)^{NT}_{SNG}}$$

dimana :

CVI : koefisien ketidakseimbanganvertikal

TR_{sp} : Dana Alokasi Khusus (DAK)

TR_{gp} : Dana Alokasi Umum (DAU)

B : Pinjaman Daerah

EXP : Total Pengeluaran APBD

IGNB : Penerimaan kembali pinjaman

REV : Pendapatan Daerah

REV_{sh} : Bagi hasil Pajak (BHP) dan Bagi Hasil Bukan Pajak (BHBP)

Selanjutnya , untuk melihat tingkat pemerataan antar daerah, mengacu pada penelitian Bird dan Tarasov (2002) dengan menggunakan konsep ketidakseimbangan fiskal horizontal. Untuk melihat tingkat ketidakseimbangan horizontal, Bird dan Tarasov menggunakan indeks dispersi untuk membagi daerah dengan nilai rendah dan nilai tinggi, dan akhirnya menggunakan indeks Theil. Indeks Theil adalah ukuran dispersi yang akan dihitung sehingga ketika variabel diukur sebanding dengan populasidaerah, dibutuhkan nilai 0. Indeks Dispersi digunakan untuk mengukur tingkat penyebaran

pada titik keseimbangan pada kelompok daerah dengan nilai rendah atau nilai tinggi pada rata-rata deviasi yang dipaparkan sebagai berikut :

$$CV_U = \frac{\sqrt{\sum_i \frac{(y_i - \bar{y}_U)^2}{N}}}{\bar{y}_U}; \quad CV_P = \frac{\sqrt{\sum_i (y_i - \bar{y})^2 \cdot \frac{P_i}{P}}}{\bar{y}}; \quad R_P = \frac{\sum_i |y_i - \bar{y}| \cdot \frac{P_i}{P}}{\bar{y}}$$

Dan terakhir indeks Theil adalah penghitungan ukuran dispersi sehingga ketika variabel diukur sebanding dengan populasi daerah, dibutuhkan nilai 0. Mengacu pada Formula indeks theil yang dikemukakan oleh Bird dan Tarasov (2002:12), untuk mengukur tingkat ketidakseimbangan fiskal horizontal digunakan tiga variabel antara lain PAD Perkapita, PDRB Perkapita dan pengeluaran perkapita yang akan dibagi menjadi tiga tipe sebagai berikut :

Tipe 1 : Indeks Theil tingkat pemerataan PAD Perkapita di antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2007-2012

$$T = \sum_i \left(\frac{Y_i}{Y} \right) \cdot \frac{P_i}{P} \cdot \log \left(\frac{Y_i}{Y} \right)$$

Tipe 2 : Indeks Theil tingkat pemerataan PDRB Perkapita di antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2007-2012

$$T = \sum_i \left(\frac{y_i}{y} \right) \cdot \frac{P_i}{P} \cdot \log \left(\frac{y_i}{y} \right)$$

Tipe 3 : Indeks Theil tingkat pemerataan Pengeluaran Perkapita di antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2007-2012

$$T = \sum_i \left(\frac{x_i}{x} \right) \cdot \frac{P_i}{P} \cdot \log \left(\frac{x_i}{x} \right)$$

Dimana :

T : Indeks Theil

Y_i : PAD Per Kapita daerah (kabupaten.kota) ke i

Y : Total PAD per kapita Provinsi Jawa Timur

y_i : PDRB Per Kapita daerah (kabupaten.kota) ke i

y : Total PDRB per kapita Provinsi Jawa Timur

x_i : Pengeluaran Per Kapita daerah (kabupaten.kota) ke i

x : Total Pengeluaran per kapita Provinsi Jawa Timur

P_i : Populasi penduduk daerah (kabupaten.kota) ke i

P : Populasi Penduduk Jawa Timur

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Ketidakseimbangan Fiskal Vertikal

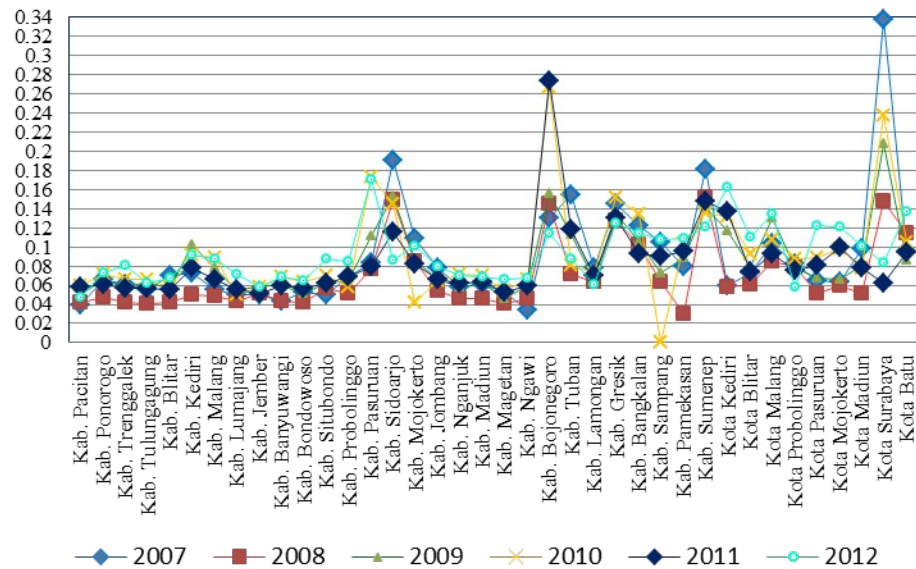
Salah satu tujuan kebijakan desentralisasi fiskal adalah untuk lebih memandirikan pemerintah kabupaten/kota, atau mengurangi ketidakseimbangan fiskal vertikal. Kemandirian daerah dalam hal ini dilihat dari aspek kontribusi daerah dalam membiayai pengeluarannya, atau seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penerimaan total dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan yang bersifat sentralistik menimbulkan ketergantungan daerah pada pusat, menghambat perkembangan pembangunan masyarakat daerah. Oleh karena itu, daerah perlu diberi keleluasaan menetapkan kebijakan untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerahnya. Sementara itu, dari sisi anggaran, desentralisasi fiskal dapat memberikan sumbangan dalam penyediaan jasa publik secara efisien yang sesuai dengan keinginan masyarakat lokal. Desentralisasi fiskal juga diharapkan bisa meningkatkan pendapatan sumber-sumber penerimaan di daerah. Pada akhirnya, dari sisi anggaran, kebijakan ini dapat mengurangi ketergantungan dana dari pusat dan daerah memiliki keleluasaan dalam mengelola anggaran yang dimilikinya, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dilihat dari sisi penerimaan porsi transfer dari pemerintah pusat dengan menggunakan perhitungan atas dasar Koefisien ketidakseimbangan fiskal vertikal (CVI1) ternyata terdapat perbedaan hasil yang mencolok (lihat grafik 4.1) dalam besarnya nilai transfer yang diberikan kepada pemerintah daerah di Jawa Timur pada tahun 2007-2012. Pada tahun 2007 Kabupaten Ngawi mendapat porsi transfer paling bawah dengan nilai 0.035, tetapi pada tahun-tahun berikutnya meningkat. Kabupaten Sidoarjo mendapat porsi transfer tertinggi pada tahun 2007 dengan nilai 0.1908. Diikuti dengan Kabupaten Sumenep 0.1806. Pada tahun 2008 beberapa daerah cenderung mengalami peningkatan dalam nilai porsi transfer yang diberikan. Kabupaten Ngawi yang pada tahun sebelumnya mendapat porsi transfer terendah juga mengalami peningkatan sebesar 0.046. Sementara porsi transfer terendah pada tahun 2008 diterima oleh Kabupaten Pamekasan dengan nilai 0.029 yang pada tahun sebelumnya mendapatkan porsi 0.079 atau menurun 0.050. Pada tahun 2010 Kabupaten Sampang tidak mendapatkan transfer bagi hasil sama sekali. Kondisi yang berbeda ditunjukkan di Kabupaten Bojonegoro, pada tahun 2011 memperoleh transfer sebesar 0.273.

Dari wilayah perkotaan, Kota Surabaya mendapatkan porsi transfer bagi hasil tertinggi setiap tahun mulai tahun 2007 hingga 2010 dengan nilai mencapai 0.337. Tetapi pada tahun ke tahun berikutnya, transfer bagi hasil antar pemerintah ke Kota Surabaya mengalami penurunan. Sementara Kota Kediri pada tahun 2007 berada di nilai terendah, namun pada tahun berikutnya terus mengalami peningkatan hingga 0.1627, Kondisi ini berbanding terbalik dengan Kota Probolinggo yang dari tahun ke tahun nilai transfer bagi hasilnya malah menurun hingga di nilai 0.057. Sementara kota lain, pada tahun 2007-2012 juga mengalami kenaikan dan penurunan yang nilainya tidak berbeda jauh dari tahun sebelumnya. Seperti Kota Pasuruan di tahun 2008 mengalami penurunan namun di tahun 2009 nilai transfer yang diperoleh meningkat lagi.

Dari grafik 1.1 tersebut menunjukkan bahwa perbedaan transfer bagi hasil tiap daerah di Jawa Timur pada tahun 2007-2012 mempengaruhi tingkat ketidakseimbangan fiskal vertikal. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tiap daerah dalam mengelola pajak dan sumber daya yang dimiliki. Semakin tinggi pajak yang dapat dikumpulkan, maka semakin tinggi pula transfer bagi hasil yang diperoleh. Begitu pun sebaliknya dari sisi sumber daya, semakin tinggi nilai pengelolaan sumber daya, dana bagi hasil yang didapatkan meningkat pula. Kota Surabaya sebagai pengumpul pajak terbanyak berhak mendapatkan transfer bagi hasil yang nilainya melebihi kabupaten / kota lain yang ada di Jawa Timur. Sementara kondisi lain ditunjukkan oleh Kabupaten Sampang yang tidak mendapat transfer sama sekali pada tahun 2010.

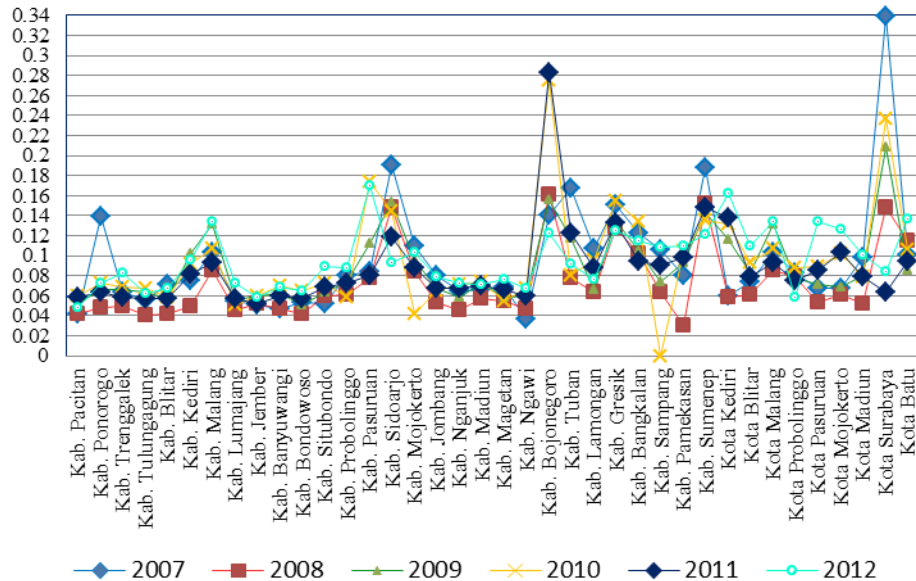
Grafik 1.1 : Porsi transfer (CVI1) antar Pemerintah dalam belanja daerah kabupaten/kota Jawa Timur tahun 2017-2012



Sumber: DJPK, Realisasi APBD 2007-2012 (diolah)

Selanjutnya pada grafik 1.2 dijelaskan pula konsep koefisien ketidakseimbangan fiskal vertikal dari total porsi transfer bagi hasil dan pinjaman pemerintah yang dilambangkan dengan CVI2. Pada grafik tersebut terlihat beberapa daerah mengalami peningkatan setelah penambahan dari variabel pinjaman. Kabupaten Ponorogo pada tahun 2007 mengalami peningkatan 0.1391. Sebelumnya tanpa penambahan variabel pinjaman, nilai koefisien ketimpangan fiskal vertikal Kota Ponorogo sebesar 0.067. Pada tahun 2008 penambahan nilai dari pinjaman juga terjadi di Kabupaten Bojonegoro 0.161 atau meningkat 0.084. Pada tahun 2009 Kabupaten Magetan juga mengalami penambahan nilai tertinggi dari pinjaman, koefisien Kabupaten Magetan mengalami peningkatan sebesar 0.013. Pada tahun 2010 Kabupaten Lamongan mengalami penambahan nilai dari pinjaman juga, nilai koefisien nya menjadi 0.096 dari sebelumnya 0.073. Selanjutnya kabupaten bojonegoro di tahun 2011 juga naik koefisien dari penambahan variable pinjaman, kenaikannya sebesar 0.009. Dan pada tahun 2012 Kabupaten Sidoarjo mendapatkan pinjaman tertinggi.dengan kenaikan nilai koefisien 0.007. Kabupaten Sampang baik dari perhitungan CVI1 dan CVI2 berada di nilai 0 dikarenakan Kabupaten Sampang tidak menerima transfer bagi hasil dan juga pinjaman pada tahun 2010. Penambahan nilai dari sisi pinjaman mampu mengurangi tingkat ketidakseimbangan fiskal vertikal di beberapa daerah. Dari sisi pinjaman terdapat perbedaan dalam besaran nilai pinjaman yang diperoleh tiap daerah dikarenakan mengikuti kebutuhan tiap-tiap daerah yang berbeda. Sebagian daerah telah terpenuhi hanya dengan transfer pemerintah pusat tanpa harus melakukan pinjaman. Sebagian daerah dapat memenuhi kebutuhannya dengan menambah melalui pinjaman.

Grafik 1.2 : Total transfer dan pinjaman (CVI2) antar Pemerintah dalam belanja daerah kabupaten/kota Jawa Timur Tahun 2007-2012



Sumber: DJPK, Realisasi APBD 2007-2012 (diolah)

Untuk melihat tingkat ketidakseimbangan fiskal vertikal di Jawa Timur digunakan juga perhitungan koefisien fiskal dengan melihat porsi total belanja pemerintah daerah yang tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah itu sendiri yang dilambangkan dengan CVI3 (grafik 4.3). Dalam perhitungan ini dijelaskan tentang total belanja atau pengeluaran pemerintah daerah tanpa transfer antar pemerintah dan juga pinjaman pemerintah daerah. Dan dapat juga dilihat Kota/Kabupaten yang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Pada tahun 2007, tingkat porsi belanja yang tidak dapat dipenuhi tertinggi berada di Kabupaten Sidoarjo dengan nilai 0.422 yang pada tahun-tahun berikutnya semakin tinggi, namun pada tahun 2012 tingkat total belanja yang tidak dapat dipenuhi oleh keuangan Kabupaten Sidoarjo turun menjadi 0.324. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Bojonegoro yang memiliki tingkat belanja yang tidak dapat dipenuhi oleh keuangan daerah nya sendiri dengan nilai 0.418 yang pada tahun-tahun berikutnya malah semakin tinggi, bahkan hingga tahun 2012 jumlahnya menjadi 0.614. Sebaliknya Kabupaten Situbondo pada tahun 2007 memiliki tingkat porsi belanja yang tidak dapat dipenuhi terendah dengan nilai 0.068 diikuti Kabupaten Tulungagung di tahun 2008 dengan 0.120 dan di tahun 2009 Kabupaten Lumajang memperoleh tingkat porsi belanja yang tidak dapat dipenuhi terendah dengan nilai 0.185 .

Di beberapa Kabupaten pada tahun 2010 terjadi kenaikan signifikan pada total belanja yang tidak dapat di *cover*, salah satunya adalah Kabupaten Malang mengalami kenaikan yang signifikan pada total belanja yang tidak dapat dipenuhi. Pada tahun 2009 Kabupaten Malang berada di 0.210, namun pada tahun 2010 total belanja yang tidak dapat dipenuhi keuangan daerah nya mengalami kelonjakan hingga 0.378. Kabupaten Jember pada tahun 2011 memiliki total belanja yang tidak dapat dipenuhi terendah dengan nilai 0.300. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2012 hampir setiap Kabupaten mengalami penurunan dari total belanja yang tidak dapat dipenuhi keuangannya sendiri. Hanya Kabupaten Blitar yang mengalami peningkatan dari 0.311 menjadi 0.322.

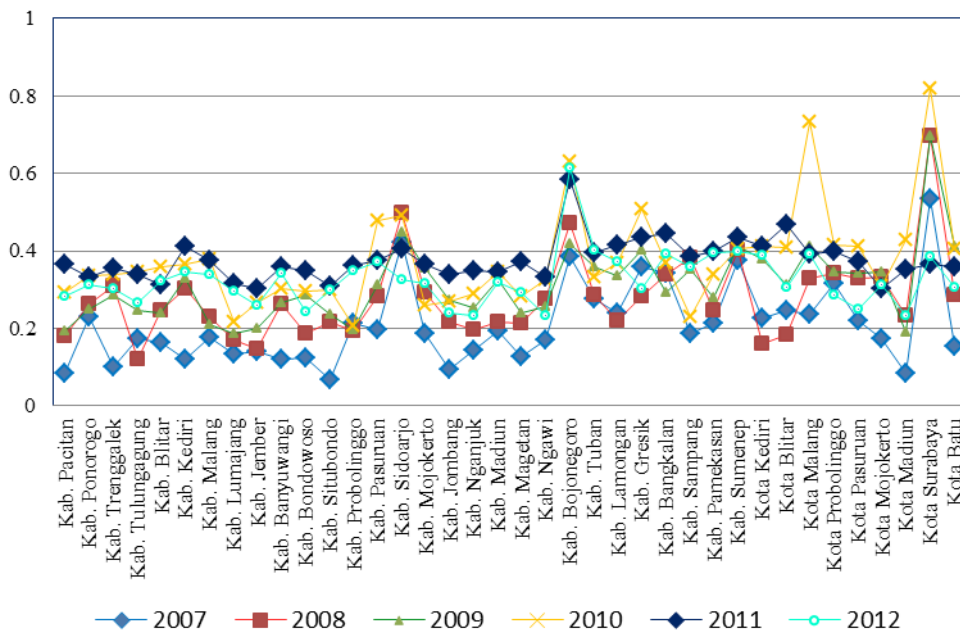
Dari wilayah perkotaan, Kota Surabaya dari tahun ke tahun menjadi Kota yang memiliki tingkat total belanja yang tidak dapat dipenuhi tertinggi. Hanya pada tahun 2011 dan 2012 nilai dari total belanja yang tidak dapat dipenuhi keuangan daerah nya menurun. Pada tahun 2007, Kota Surabaya memiliki nilai total pengeluaran yang tidak dapat dipenuhi tertinggi dengan nilai 0.535 dan

Kota Madiun terendah dalam total pengeluaran yang tidak dapat dipenuhi dengan nilai 0.083. Selanjutnya di tahun-tahun berikutnya setiap daerah mengalami peningkatan dalam hal total belanja yang tidak dapat dipenuhi hanya di Kota Blitar yang mengalami penurunan pada tahun 2008 dengan nilai 0.182. Pada tahun 2010 Kota Malang mengalami kenaikan yang signifikan dari 0.412 di tahun 2009 menjadi 0.734 atau mengalami peningkatan sebesar 0.322. Pada tahun 2012 setiap kota mengalami penurunan dari nilai pada tahun 2011. Porsi belanja yang tidak dapat dipenuhi tertinggi berpindah ke Kota Kediri dengan nilai 0.387 diikuti dengan Kota Surabaya dengan nilai 0.384 dan terendah berada di Kota Madiun dengan nilai 0.233.

Selanjutnya dari perhitungan CVI3 dapat disimpulkan beberapa Kabupaten dan Kotadi Jawa Timur memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Tingginya nilai ketergantungan terhadap pusat menggambarkan rendahnya nya kemandirian fiskal Kota/Kabupaten tersebut. Dari sisi Kabupaten, terlihat beberapa daerah yang memiliki tingkat pengeluaran yang tinggi antara lain Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Kediri. Pada tahun 2007 beberapa Kabupaten menunjukkan tingkat pengeluaran yang tak terpenuhi rendah seperti Kabupaten Pacitan, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Jombang. Tetapi pada tahun-tahun berikutnya hampir di semua Kabupaten dan Kota di Jawa Timur mengalami peningkatan dalam hal total belanja yang tidak dapat di *cover*.

Beberapa daerah yang memiliki pendapatan asli daerah tinggi, cenderung melakukan belanja atau pengeluaran yang tinggi juga seperti ditunjukkan di Kota Surabaya yang memiliki total pendapatan asli daerah tertinggi di Jawa Timur dan juga transfer bagi hasil tertinggi cenderung melakukan belanja yang tinggi pula. Beberapa daerah mengabaikan tingkat ketidakseimbangan fiskal vertikal untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi seperti yang terjadi di Kota Surabaya.

Grafik 1.3: Porsi Belanja yang tidak dapat dipenuhi (CVI3) Kabupaten / Kota Jawa Timur tahun 2007-2012



Sumber: DJPK, Realisasi APBD 2007-2012 (diolah, lihat lampiran II)

4.3 Analisis Ketidakseimbangan fiskal Horizontal

Ketidakseimbangan fiskal horisontal muncul ketika tidak ada pengaturan yang jelas antara belanja dengan tanggung jawab kapasitas fiskal di pemerintah daerah. Umumnya, Pemerintah daerah memiliki kapasitas pajak yang berbeda karena mereka memiliki basis ekonomi yang berbeda. Ketidakseimbangan fiskal horisontal juga dapat dikaitkan dengan perbedaan dalam belanja pemerintah tiap daerah dan kebutuhan tiap daerah yang bervariasi dalam kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan mereka sendiri. Tiap Kabupaten dan Kota yang berada di Jawa Timur juga memiliki kapasitas pajak yang berbeda karena perbedaan lokasi, perbedaan ketersediaan sumber daya alam, perbedaan pola demografi dan perbedaan struktur ekonomi.

Instrumen desentralisasi fiskal yang bisa mengurangi ketidakseimbangan fiskal horizontal adalah instrumen subsidi (*grants*). Implikasinya, subsidi yang dialokasikan kepada setiap daerah dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat berbeda-beda. DAU ditransfer pemerintah pusat kepada daerah bersifat “*block grant*”, yang berarti daerah diberi keleluasaan dalam penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dengan tujuan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan antardaerah. Ketidakseimbangan fiskal horizontal di Jawa Timur masih sangat besar. Ketidakseimbangan antardaerah di Jawa Timur tidak bisa dilepaskan dari ketidakmerataan dalam hal penguasaan sumber daya alam atau sumber penerimaan antara daerah satu dan daerah lainnya, selain juga perkembangan industri setempat.

Rentang nilai untuk ketidakseimbangan fiskal horizontal di Kabupaten dan Kota Jawa Timur baik dari nilai koefisien yang berbobot, nilai koefisien tidak berbobot, rata-rata koefisien dan indeks theil menunjukkan perbedaan nilai antar kabupaten dan kota di Jawa Timur (lihat lampiran). Dengan menggunakan beberapa variabel antara lain pendapatan asli daerah perkapita, pengeluaran perkapita dan PDRB perkapita. Periode yang digunakan selama enam tahun mulai tahun 2007 hingga 2012, hanya pada PDRB perkapita karena keterbatasan data rentang waktu yang digunakan dari tahun 2007 hingga tahun 2011. Untuk lebih menjelaskan tentang ketidakseimbangan fiskal horizontal antar daerah di Jawa Timur, berikut akan disajikan indeks theil antar daerah Kabupaten / Kota di Jawa Timur yang meliputi PDRB Perkapita, pendapatan asli daerah perkapita dan pengeluaran perkapita.

Tabel 1.1: Indeks Theil Ketidakseimbangan Fiskal Horizontal antar daerah Kabupaten/Kota Jawa Timur tahun 2007-2012

Indeks Theil antar daerah	PDRB Perkapita	PAD Perkapita	Pengeluaran Perkapita
Kab. Bangkalan	-0.0038	-0.0037	0.0673
Kab. Banyuwangi	0.0013	-0.0040	0.0731
Kab. Blitar	-0.0040	0.0392	0.0673
Kab. Bojonegoro	-0.0022	-0.0009	0.0663
Kab. Bondowoso	-0.0029	-0.0028	0.0490
Kab. Gresik	0.0190	0.0151	0.0628
Kab. Jember	-0.0093	-0.0099	0.0682
Kab. Jombang	-0.0033	-0.0021	0.0550
Kab. Kediri	-0.0050	-0.0059	0.0587
Kab. Lamongan	-0.0041	-0.0006	0.0688
Kab. Lumajang	-0.0013	-0.0029	0.0492
Kab. Madiun	-0.0025	-0.0018	0.0570
Kab. Magetan	-0.0016	-0.0013	0.0605
Kab. Malang	-0.0057	-0.0094	0.0749
Kab. Mojokerto	-0.0002	0.0000	0.0532
Kab. Nganjuk	-0.0040	-0.0032	0.0620

Indeks Theil antar daerah	PDRB Perkapita	PAD Perkapita	Pengeluaran Perkapita
Kab. Ngawi	-0.0031	-0.0028	0.0616
Kab. Pacitan	-0.0021	-0.0009	0.0504
Kab. Pamekasan	-0.0026	-0.0025	0.0489
Kab. Pasuruan	-0.0017	-0.0023	0.0550
Kab. Ponorogo	-0.0033	-0.0029	0.0634
Kab. Probolinggo	-0.0008	-0.0036	0.0448
Kab. Sampang	-0.0037	-0.0028	0.0498
Kab. Sidoarjo	0.0418	0.0578	0.0847
Kab. Situbondo	-0.0023	-0.0027	0.0475
Kab. Sumenep	-0.0037	-0.0039	0.0591
Kab. Trenggalek	-0.0025	0.0000	0.0582
Kab. Tuban	0.0012	-0.0018	0.0528
Kab. Tulungagung	-0.0015	-0.0025	0.0701
Kota Blitar	-0.0008	0.0023	0.0382
Kota Kediri	0.0883	0.0038	0.0759
Kota Madiun	0.0004	0.0004	0.0445
Kota Malang	0.0097	-0.0016	0.0608
Kota Mojokerto	0.0377	0.0847	0.0485
Kota Pasuruan	-0.0006	-0.0002	0.0435
Kota Probolinggo	0.0005	0.0009	0.0505
Kota Surabaya	0.1459	0.0634	0.2352
Kota Batu	-0.0005	-0.0006	0.0376

Sumber: BPS, Populasi Penduduk Jawa Timur. DJPK, Realisasi APBD 2007-2012 (diolah)

Secara keseluruhan data indeks theil tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan yang cukup besar dalam kesenjangan antar daerah baik di seluruh daerah dari waktu ke waktu. Dalam hal rasio dari tingkat kemampuan daerah tinggi ke tingkat kemampuan daerah rendah untuk PDRB perkapita, misalnya, Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik tertinggi dan Kabupaten Pacitan terendah. Kota Surabaya dari hasil perhitungan indeks theil menunjukkan nilai PDRB Perkapita sebesar 0.1459, sedangkan Kabupaten Pacitan nilai indeks theil PDRB Perkapita hanya -0.0021 dan. Perbedaan antara kesenjangan daerah diukur dari PDRB dan dalam hal kemampuan daerah dapat memberikan ukuran yang berguna bagi efek dari kebijakan pemerintah.

Sebuah perbandingan lain yang lebih langsung berhubungan dengan pemerataan seperti dibahas di atas adalah "PAD" daerah dibandingkan dengan total belanja daerah. Perbedaan menunjukkan sejauh mana transfer antar pemerintah mampu mengimbangi keadaan ketidakseimbangan fiskal antar daerah. Misalnya, koefisien variasi tertimbang untuk kedua PAD dan total belanja daerah di Kabupaten Pacitan yang jauh lebih rendah daripada di Kabupaten Sidoarjo, dengan pemerataan substansial yang jelas di kedua daerah. Nilai PAD Perkapita Kabupaten Pacitan hanya -0.0009 dengan pengeluaran perkapita sebesar 0.0504. Berbanding terbalik dengan Kabupaten Pacitan, Kabupaten Sidoarjo dari hasil perhitungan indeks theil mempunyai nilai PAD Perkapita sebesar 0.0578 dan pengeluaran daerah sebesar 0.0847. Dari table 4.1 tersebut terlihat masih banyaknya daerah dari hasil perhitungan indeks theil menunjukkan nilai negatif, hanya beberapa daerah yang menunjukkan nilai PAD Perkapita positif antara lain Kabupaten Blitar, Kabupaten Gresik,

Kabupaten Sidoarjo. Dari sisi perkotaan yang mempunyai nilai negatif hanya terdapat di Kota Malang, Kota Pasuruan dan Kota Batu. Sedangkan daerah yang mempunyai nilai 0 dari indeks theil adalah Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Trenggalek yang menandakan bahwa PAD Perkapita kedua daerah tersebut yang sebanding dengan tingkat populasi daerahnya.

Dari hasil perhitungan ini, dapat dilihat peran dari DAU terhadap mengatasi tingkat ketidakseimbangan fiskal horizontal. DAU diberikan berdasarkan celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan kebutuhan daerah yang dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah, kebutuhan daerah dihitung berdasarkan variabel-variabel yang ditetapkan undang-undang sedangkan perhitungan kapasitas fiskal didasarkan atas Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil yang diterima daerah. Sementara Alokasi Dasar dihitung berdasarkan gaji PNS daerah. Kebutuhan Fiskal dapat diartikan sebagai kebutuhan daerah untuk membiayai semua pengeluaran daerah dalam rangka menjalankan fungsi/kewenangan daerah dalam penyediaan pelayanan publik. Beberapa daerah yang memiliki tingkat PAD Perkapita tinggi cenderung memiliki tingkat pengeluaran perkapita yang tinggi juga.

Di beberapa daerah seperti Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Mojokerto memiliki tingkat pendapatan dan pengeluaran perkapita yang sama tinggi nilainya. DAU yang diberikan kepada daerah dengan nilai tinggi ini otomatis masih besar nilainya dibandingkan dengan daerah yang memiliki nilai rendah. Karena semakin tinggi nilai PAD Perkapita, nilai pengeluaran perkapita juga semakin tinggi. Dari perhitungan DAU menggunakan celah fiskal, tentu nilai dari DAU Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik masih lebih tinggi daripada daerah yang memiliki tingkat kemampuan fiskal rendah. Diharapkan setiap daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar dari kebutuhan fiskal maka dapat menerima penurunan DAU, dan atau tidak menerima sama sekali pada tahun berikutnya. Hal inilah yang digunakan untuk mengurangi ketidakseimbangan fiskal horizontal. Daerah “kaya” seperti Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo diberikan DAU yang lebih kecil dibandingkan daerah lainnya.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa ditarik dari hasil penelitian dan pembahasan adalah :

1. Bahwa selama periode penelitian, ketidakseimbangan fiskal vertikal di tiap daerah di Jawa Timur dari tahun ke tahun semakin tinggi, namun pada tahun 2012 besaran nilai dari ketidakseimbangan fiskal vertikal menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Ketergantungan fiskal yang tinggi terdapat hampir di seluruh Kabupaten dan Kota yang ada di Jawa Timur. Kabupaten dan Kota yang memiliki tingkat kapasitas fiskal tinggi cenderung memiliki tingkat kebutuhan fiskal yang tinggi juga. Dari tahun ke tahun kebutuhan fiskal tiap daerah semakin tinggi juga yang berdampak secara langsung dengan semakin tingginya tingkat transfer yang dilakukan oleh pemerintah pusat di daerah dengan kapasitas fiskal tinggi.
2. Bahwa selama periode penelitian, masih adanya tingkat ketidakseimbangan fiskal horizontal yang tinggi di tiap Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. Tingkat pemerataan di Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang masih belum sesuai dengan ditunjukkan oleh masih besarnya tingkat penguasaan transfer di Kabupaten dan Kota tertentu. Tingkat pemerataan baik dari PAD Perkapita, PDRB Perkapita dan Pengeluaran Perkapita masih menunjukkan tingkat kesenjangan yang sangat tinggi. Beberapa daerah memiliki tingkat transfer yang sangat tinggi, sedangkan daerah lain memiliki tingkat transfer yang lemah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pentingnya pemerintah pusat untuk mendesain kebijakan transfer yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan tiap daerah dan mampu menciptakan pemerataan di tiap daerah.
2. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber pendapatan baru yang dapat menambah kapasitas fiskal daerahnya sesuai dengan sumber daya dan juga struktur ekonomi daerahnya. Pentingnya mengeksplorasi sumber-sumber pendapatan daerah yang baru. Selama ini pemerintah daerah masih cenderung hanya menggali pendapatan dari sector pajak dan retribusi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga panduan ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Asosiasi Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya dan Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya yang memungkinkan jurnal ini bisa diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Auerbach, Alan J. 1997. Quantifying the Current U.S Fiscal Imbalance. *National Tax Journal Vol 50 no.3*, pp. 397-98.
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2011. *PDRB Provinsi Jawa Timur 2007-2011*. Jawa Timur: BPS.
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2011. *Statistik Daerah Provinsi Jawa Timur 2011*. Jawa Timur: BPS
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2011. *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka Tahun 2011*. Jawa Timur: BPS
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2011. *Survey Sosial Ekonomi Nasional 2011 Provinsi Jawa Timur*. Jawa Timur: BPS
- Baharumshah, Ahmad Zubairi dan Lau, Evan, 2003. Regime Changes and The Sustainability of Fiscal Imbalance in East Asian Countries, *Department of Economics, Faculty of Economics & Management 43400 UPM Serdang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia*.
- Basri, Yuswar Zainul dan Mulyadi Subri, 2005, *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Bird, Richard & Tarasov, Andrey V. ,2002. Closing the Gap: Fiscal Imbalances and Intergovernmental Transfers in Developed Federations, *International Studies Program, Andrew Young School of Policy Studies*, Working Paper No.02-02
- Boadway, Robin & Tremblay, Jean-Francois. 2005. A Theory of Vertical Fiscal Imbalance. *IFIR Working Paper No.2006-4*
- Boex, J. 2004. *An Introductory Overview of Intergovernmental Fiscal Relations Local Body Fiscal Commission in Nepal*. Georgia State University in USA: UNCDF.

- Borge, Lars-Erik. Rattso, Jorn. Spending Growth With Vertical Fiscal Imbalance: Decentralized Government Spending in Norway 1880-1990. *Department of Economics Norwegian University of Science and Technology*
- Bouton, L. Gassner, M. Verardi, V. 2008. Redistributing Income Under Fiscal Vertical Imbalance. *European Journal of Political Economy* 24.317–328
- Dahlby, B. L.S.Wilson. 1994. Fiscal Capacity, Tax Effort and Optimal Equalization Grants. *The Canadian Journal of Economics*, 27(3),657-672
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPk). 2007. *Realisasi APBD Tahun 2007*. www.djpk.depkeu.go.id. Diakses pada tanggal 10 Maret 2013.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPk). 2008. *Realisasi APBD Tahun 2008*. www.djpk.depkeu.go.id. Diakses pada tanggal 10 Maret 2013.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPk). 2009. *Realisasi APBD Tahun 2009*. www.djpk.depkeu.go.id. Diakses pada tanggal 10 Maret 2013.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPk). 2010. *Realisasi APBD Tahun 2010*. www.djpk.depkeu.go.id. Diakses pada tanggal 10 Maret 2013.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPk). 2011. *Realisasi APBD Tahun 2011*. www.djpk.depkeu.go.id. Diakses pada tanggal 10 Maret 2013.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPk). 2012. *Realisasi APBD Tahun 2012*. www.djpk.depkeu.go.id. Diakses pada tanggal 10 Maret 2013.
- Dollery, Brian. 2002. A Century of Vertical Fiscal Imbalance in Australian Federalism. *Working Paper Series in Economics University of New England. No.2002-6*
- Eyraud, Luc. Lusinyan, Lusine. 2012. Vertical Fiscal Imbalances and Fiscal Performance in Advanced Economies, *Carnegie-Rochester-NYU Conference Series on Public Policy*
- Farhan, Yuna (Ed). 2004. Policy Recommendations on Revision of Regional Fiscal Balance Funding (Dana Perimbangan). Jakarta: Seknas FITRA
- Helmsing, Bert A.H.J. 1997. Local Government & Finance: An Introduction Institute of Social Studies, The Hague.
- Karpowicz, Izabela. 2012. Narrowing Vertical Imbalances in Four European Countries, *IMF Working Paper, WP/12/91*
- Khusaini, M. 2006. *Ekonomi Publik : Desentralisasi Fiskal Dan Pembangunan Daerah*. Malang: Badan Penerbit FEUB.
- Koswara, E., 2001, *Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*. Jakarta: Pariba
- Musgrave, R. A, Musgrave P.B. 1984. Public Finance in Theory and Practice Forth Edition. McGraw-Hill Book Company.
- Norris, E. D. 2006, The Challenge of Fiscal Decentralization in Transition Countries. International Monetary Fund, Washington DC, USA

- Pandey, Bharat Many. 2008. Causes and Consequence of Fiscal Imbalance in Nepal. *Institute of Social Studies*.
- Rangarajan,C.Srivastava,D.K. 2008. Reforming India's Fiscal Transfer System: Resolving Vertical and Horizontal Imbalances, *Madras School of Economics*, Working Paper 31/2008
- Ruggeri, G.C. Howard, R. 2001. On The Concept and Measurement of Vertical Fiscal Imbalances, *SIPP Public Policy Paper No.6*
- Sharma, Chancal Kumar. 2007. Rescuing the Concept of Vertical Fiscal Imbalance, *Munich Personal RePEc Archive*.Paper No.39343
- Simanjuntak.A.R, 2003 : Kebutuhan Fiskal, Kapasitas Fiskal, dan Optimalisasi Potensi PAD, *LPEM Working Paper No.5*
- Solihin.A, Lestari.A.N. 2010. Analisis Ketimpangan Fiskal di Indonesia Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah. *Majalah Ekonomi Tahun XX*, No.1 April 2010
- Suparmoko, M. 1987. *Keuangan Negara (dalam teori dan praktek, edisi keempat)*. Yogyakarta: BPFE
- Tangkilisan.S.N. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT.Grasindo
- Vazquez, J.M. 2004. The Assignment of Expenditure Responsibilities Local Body Fiscal Commission in Nepal. Georgia State University in USA: UNCDF
- Arize, A.C. 1996. The impact of exchange-rate uncertainty on export growth : evidence from Korean data. *International Economic Journal*, Vol.10, (No.3) : 36-41